



DPRD Setujui APBD Perubahan 2015

TABANAN - Setelah melalui serangkaian pembahasan, rancangan Perubahan APBD Tabanan 2015 akhirnya mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat. Selanjutnya, rancangan anggaran perubahan tersebut akan diajukan ke Pemprov Bali untuk dievaluasi dan diverifikasi. Persetujuan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna yang digelar di DPRD Tabanan, Senin (7/9).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi itu dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada. Atas persetujuan tersebut, Penjabat Bupati Sugiada menyampaikan rasa terima kasihnya. Karena rancangan anggaran perubahan tersebut telah dibahas sesuai mekanisme yang berlaku dengan lancar. "Hal itu tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab, komitmen, kesungguhan, dan kerja sama yang baik dari pimpinan dan seluruh anggota dewan," kata Sugiada saat memberikan sambutan. Di kesempatan yang sama dia juga berharap, tahapan evaluasi dan verifikasi di Pemprov Bali secepatnya membuahkan hasil. Sehingga



KETUT SUGINA/RADAR BALI

rancangan anggaran perubahan yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD bisa ditetapkan sesegera mungkin. Dan, seluruh program yang dianggarkan bisa dilaksanakan.

Secara garis besar, sambungnya, penerimaan daerah khususnya untuk pendapatan asli daerah (PAD) dalam rancangan anggaran perubahan sebesar Rp 264 miliar lebih. Anggaran pada pos pendapatan itu terdiri dari

**SAH: APBD
Perubahan 2015
Tabanan
dijetujui
dewan.**

pajak daerah sebesar Rp 92,974 miliar, retribusi sebesar Rp 42 miliar, dan PAD lain-lainnya yang sah sebesar Rp 121,658 miliar dari jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 1,596 triliun. Sedangkan untuk besaran belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1,702 triliun terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 561,616 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,140 triliun. (gin/gup)

Edisi : Selasa, 8 Sept 2015

Hal : 25



Sekda Rai Iswara: Bentengi Godaan Korupsi dengan "Catur Purusa Artha"

DENPASAR – Guna meningkatkan pemahaman Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tentang menanggulangi serta mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya masing-masing dengan konsep, "Ayo Kerja, Stop Korupsi!!", Pemerintah Kota Denpasar berkerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali menggelar Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan *Focus Group* Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, di Aula SMKN 5 Denpasar, Senin (7/9).

Acara ini di hadiri langsung oleh Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara sekaligus membuka sosialisasi yang ditandai dengan pemukulan gonggong dan penerimaan plakat. Hadir pula Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto dan Kepala Disdikpora Kota Denpasar Gusti Ngurah Eddy Mulya. Sekda Rai Iswara saat membuka Sosialisasi Program Anti Korupsi mengungkapkan, Korupsi jika dilihat dari bingkai budaya dan filosofi Hindu merupakan salah satu godaan didalam kehidupan, dimana untuk mengatasi godaan korupsi kita harus bisa berpedoman dengan salah satu ajaran Hindu. Yakni, "Catur Purusa Arta" yang berarti empat tujuan hidup manusia.

Dikatakan, manusia boleh mencari kekayaan atau materi asalkan sesuai dengan sandaran yang jelas. Yaitu, kepantasan, kepatutan dan kewajaran yang disebut dengan Dharma untuk mencapai Moksa sehingga tercapai kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan. Hal tersebut merupakan bagian dari Cartur Purusa Arta yakni Dharma, Artha, Kama, dan Moksa, oleh karena itu jadikanlah Dharma dan Moksa ini sebagai benteng diri agar



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

WASPADA: Sekda Rai Iswara (dua dari kanan depan) memberi ucapan selamat kepada para peserta Sosialisasi Program Anti Korupsi, kemarin.

terjauh dari tindakan korupsi.

Sekda Rai Iswara juga berterimakasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto karena selama ini sudah membantu dalam meringkai prosesi administrasi manajemen Pemerintahan di Kota Denpasar hingga mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengeualian (WTP) sebanyak tiga kali berturut-turut dari BPK Perwakilan Propinsi Bali. "Dengan adanya sosialisasi ini, mudah-mudahan dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah serta penghargaan WTP yang ke empat bisa diraih," katanya

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Didik Krisdiyanto mengatakan, sosialisasi ini merupakan salah satu program dari BPKP dalam mencegah korupsi dengan metode preventif edukatif yang sesuai dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (adv)

Edisi : Selasa, 8 September 2016

Hal : 24